



Dugaan "Mark-Up" Pengadaan Kapal Ikan

Syahbandar Dilibatkan Periksa Fisik Kapal

Denpasar (Bali Post) -Penyidik Pidsus Kejati Bali belum bisa merampungkan berkas kasus dugaan mark-up pengadaan kapal ikan untuk ne-layan di Buleleng. Padàhal ekspos perkara sudah dilakukan, termasuk pemeriksaan ahli dari kesyahbandaran. Saat perwakilan kelompok nelayan Buleleng menanyakan tindak lanjut penyidikan kasus tersebut ke Kejati Bali, dikatakan bahwa pihaknya menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui kerugian negara dalam perkara tersebut.

kini akan memperdalam pemeriksaan fisiknya. "Memang sudah diperiksa." Sekarang diperdalam lagi cek fisiknya, tegas Suardi. Beberapa waktu yang lalu dijelaskan

Kasitut Pidsus Kejati Bali Wayan Suardi yang juga sebagai penyidik dalam perkara

ini mengatakan, selain menunggu hasil audit BPKP, pihaknya juga akan mem-perdalam ahli syahbandar. Saat ditanya bahwa sebelumnya sudah memeriksa

syahbandar, Suardi mengatakan bahwa

bahwa hasil pemeriksaan ahli dinya-Dikonfirmasi Selasa (11/4) kemarin, takan untuk syarat kelautannya kapal

tersebut tidak layak. Bahkan, ahli dari marine KKP juga menyatakan kapal tidak layak. Sebelumnya, sejumlah kelompok nelayan di Buleleng yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) mengaku kaget atas rencana penyerahan kapal ikan bermasalah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali. Lima orang perwakilan dari KUB berbeda mendatangi Pidsus Kejati Bali guna mempertanyakan proses hukum soal pengadaan kapal ikan yang sedang dibidik Kejati Bali.

Rombongan nelayan diterima Kasip-

idsus Kejati Bali Polin O Sitanggang bersama Ketua Tim Penyidik Wayan Suardi dan Akmal Kodrat. Pada intinya, mereka akan menolak pemberian kapal bermasalah tersebut karena sedari awal kapal itu sudah masalah, karena tidak sesuai speks dan diyakini sangat berbahaya jika dipaksakan dipakai nelayan.

Penolakan itu dinilai masuk akal. Selain masih dalam proses hukum, berdasarkan keterangan ahli syahbandar dan BKI, speks kapal ini tidak benar. Bukan tidak layak lagi, tapi tidak bener, kata perwakilan nelayan. (kmb37)

Edisi : Rebuil April

Hal





Kasus Dugaan Korupsi Bansos

Kejari Tunggu Hasil **Audit BPKP**

Negara (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dari Provinsi Bali tahun 2013/2014 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, kasus ini telah ditangani sejak 2016. Dalam kasus ini, pihak Kejari telah menetapkan mantan Bendesa Kaliakah Kangin I Nyoman Baliasa sebagai tersangka. Kerugian yang ditaksir dalam kasus ini mencapai Rp

300 juta. ."Kasusnya masih dalam proses. Kita masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait indikasi kerugian negara," kata Kasipidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan, Selasa (11/4). Menurutnya, ketika baru menjabat sebagai Kasipidsus, tinggal menunggu dari BPKP untuk indikasi kerugiannya. Dikatakan, berkas hasil peny-

idikan yang dilakukan sebelumnya masih dipelajari lagi karena ada keterangan yang perlu didalami.

Pihaknya mengagendakan lagi melakukan pemeriksaan untuk pendalaman terhadap tersangka dan sejumlah saksi Sambil menunggu dari BPKP. pihaknya juga akan mendalami kasusnya. Seperti diketahui kasus dugaan korupsi bansos yang digelontorkan Provinsi Bali tahun 2013/2014 dengan tersangka Nyoman Baliasa. Tersangka diduga menyalah-

gunakan dana bansos yang semestinya untuk pembangunan pura, namun digunakan kepentingan lain. Tidak tanggungtanggung dana yang digunakan mencapai Rp 300 juta.

Namun, dalam laporan pertanggungjawaban pengunaan dana bansos menggunakan foto-foto renovasi pura yang lama dan tidak sesuai dengan kenyataan. (kmb)

: Paby, 12 April 2017 Edisi

Hal





LKPD akan Diperiksa Tim BPK Bali

Tabanan (Bali Post) -

Selama tiga puluh hari ke depan, sejak Senin (10/4) kemarin Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Bali melakukan pemeriksaan terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Pemkab Tabanan diharapkan paling lambat sudah menyampaikan LKPD akhir bulan Mei mendatang.

IĞN Satria Perwira selaku Wakil Penanggung Jawab tim BPK RI Bali saat diterima Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengatakan, kedatangan Tim BPK itu akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30

hari ke depan.

Pemeriksaan Tim BPK itu memerlukan beberapa dokumen seperti kertas kerja atas laporan keuangan, buku besar dan buku besar pembantu atas akun pendapatan dan belanja, rekapitulasi pendapatan, rincian semua piutang per SKPD, rincian beban dibayar dimuka, rincian laporan persediaan SKPD dan dokumen lainnya. "Dokumen lainnya yakni rekapitulasi utang, data rekapitulasi aset tetap dan rincian aset tetap, data aset lainnya per SKPD, rekapitulasi mutasi aset, dan data rekapitulasi utang belanja serta dokumen pendukungnya," jelasnya.

Wabup Sanjaya mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan BPK, dan meminta para OPD agar mempersiapkan segala hal utamnya dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan. "Tolong persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan BPK, sehingga pemeriksaan LKPD dapat beriolan langar" nintanya

berjalan lancar," pintanya.

Wabup Sanjaya juga menegaskan agar pihak OPD secara terbuka memberikan dokumen dan semua data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Dirinya punya visi sejalan dengan program Nawa Cita yang salah satunya, membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. (kmb28)

Edisi : Pabu, 12 April 2017

Hal : 14





Pembangunan Jalan dan Gerbang Kebun Raya

Pemkab Anggarkan Belasan Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Proyek Kebun Raya Gianyar tahun ini berlanjut. Pemkab Gianyar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menganggarkan dana belasan miliar rupiah untuk pembangunan jalan dan gerbang kebun raya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Nyoman Nuadi, Selasa (11/4) kemarin, mengungkapkan ada dua kegiatan yang saat ini tengah ditenderkan, yakni peningkatan jalan Pilan-Kebun Raya, Payan-gan senilai Rp 13,5 miliar dan pembangunan gerbang kebun raya senilai Rp 4 miliar. Kedua proyek didanai APBD Gianyar 2017.

Menurutnya, kedua proyek tersebut harus tun-tas tahun ini. Jika tidak ada halangan dalam proses tender maka kedua proyek tersebut sudah bisa dilak-sanakan di lapangan pada Mei mendatang. "Mudahmudahan bisa cepat. Target Mei mulai," katanya.

Nuadi menjelaskan, untuk jalan, lebarnya mencapai delapan meter. Jalan yang akan digarap mulai dari Desa Kerta hingga di dalam kebun raya. Selain itu, juga akan ditata areal

parkir. "Kita bagi dua, ada yang diaspal, ada juga yang dipav-Yang dipaving seperti untuk tempat parkir. Kalau untuk drainase, kita tidak tangani karena drainasenya masih alami," katanya.

Sementara untuk gerbang, akan ada dua ban-gunan yang dikerjakan. Di pintu masuk kebun raya akan dibangun candi bentar. Sedangkan di areal hutan akan didirikan sebuah candi kurung.

Lebih lanjut Nuadi berharap semua pihak dapat mendukung terlaksananya

kegiatan tersebut. Pasalnya kebun raya tersebut akan menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Gianyar. Selain itu, kawasan hutan tersebut juga memiliki fungsi penyelamatan lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Untuk diketahui, kawasan kebun raya tersebut awalnyamerupakan kawasan hutan adat Pilan, Desa Kerta Kecamatan. Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata kemudian mencanangkan pembangunan kebun raya sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat

Serangkaian persiapan

dan penelitian telah dilakukan dalam proses perencanaan kebun raya seluas 10 hektar tersebut. Kebun raya itu akan mengusung konsep tematik. Keragaman flora di hutan tersebut akan ditambah dengan beraneka ragam tumbuhan langka yang banyak digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan masyarakat Hindu Bali.

"Kebun raya ini akan menjadi museum hidup bagi generasi mendatang tentang keragaman flora dan nilainilai budaya yang ada dan berkembang di Kabupaten Gianyar," ujar Kepala Disparda Gianyar A.A. Ari Brahmanta, beberapa waktu lalu. (kmb25)

Edisi : Rabu, 12 April 2017

Hal





Program KBS Merugi Ratusan Juta Rupiah

Mangupura (Bali Post) -

Masalah kartu Krama Badung Sehat (KBS) yang menjadi program unggulan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta tidak main-main. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat setempat menyatakan kartu KBS yang bermasalah membengkak dari 25.642 menjadi 28.341 dengan nilai kerugian Rp 310.050.540.

Seperti diberitakan sebelumnya, pencetakan kartu KBS oleh CV Sembe Dewata dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.591.261.148 bermasalah. Rekanan melakukan perekaman tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dikonfirmasi Selasa (11/4) kemarin, Kabag Humas Setda Badung I Nyoman Sujendra membenarkan perihal tersebut. Bahkan, disebutkan pihak rekanan sudah mengembalikan kerugian ke kas daerah sejumlah LHP yang dikeluarkan Inspektorat. "Ya, memang ada kerugian daerah, tapi rekanan sudah mengembalikan kerugiannya ke kas daerah," kata Sujendra.

Pengembalian uang tersebut, katanya, sebagai konsekuensi 28.341 kartu yang dianggap bermasalah, seperti ada yang sudah meninggal dan pindah domisili tetapi mendapat kartu, sedangkan yang sudah melakukan perekaman ternyata belum mendapat kartu. "Per kartu kan harganya Rp 10.940. Jadi, jika dikalikan dengan 28.341 jumlah kartu bermasalah, maka hasilnya

Rp 310.050.540," paparnya.

Terkait sanksi yang diberikan kepada rekanan yakni CV Sembe Dewata karena terbukti merugikan negara, kata Nyoman Sujendra, diserahkan sepenuhnya kepada Inspektorat. "Mengenai sanksi tentunya ada, kami serahkan kepada Inspektorat dan pimpinan," ujarnya

Mantan Sekcam Kuta Selatan ini mengakui KBS merupakan program unggulan sehingga perlu dukungan seluruh komponen. "Memang ini program unggulan dari Kabupaten Badung yang harus kita kawal. Kalau memang ada kerusakan dan sebagainya, di perubahan sudah dianggarkan," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan I Gede Putra Suteja juga membenarkan Inspektorat telah mengeluarkan LHP. "Rekanan sudah mengembalikan kerugian sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat," katanya.

Menurut Suteja, pihaknya akan melakukan pencetakan ulang 28.341 kartu yang bermasalah. Program ini akan dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2017 ini. Bagi warga Badung yang belum atau kartu KBS-nya bermasalah cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program KBS. "Pencetakan kartu akan dilaksanakan pada anggaran perubahan ini," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : pabu, 12 April 2017

Hal : <u>3</u>